

## Upaya Multi Track Diplomacy Pemerintah Thailand dalam Menangani Permasalahan Perdagangan Manusia di Thailand pada 2015-2017

Carolina Omega<sup>1</sup>, Andika Drajat Murdani<sup>1</sup>, Ganjar Widhiyoga<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah, 57136

<sup>1</sup> Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah, 57136

<sup>1</sup> Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Jawa Tengah, 57136  
carolinomega@gmail.com

### ABSTRACT

*Human trafficking cases in Thailand have been around since the 1970s. Even though it has been more than three decades, cases of human trafficking in Thailand are still being found. Human trafficking is a real issue that Thailand faces every year. This study specifically discusses the efforts taken by the Thai Government in dealing with human trafficking. Human trafficking is one of the focuses in the concept of human security. The efforts made are in the form of collaboration with various sectors in the scope of the Multi Track Diplomacy concept. This research belongs to the type of qualitative research with literature study data collection techniques. Literature study due to lack of access to direct data collection, so the data used in this study is secondary data in the form of documents and publications available on the internet. After conducting the research process, the results found showed that the Thai Government carried out six of the nine lines of Multi-track Diplomacy. The six lines of cooperation synergize with each other and produce concrete actions in the Thai Government's efforts to deal with human trafficking. The cooperation carried out by the Thai Government with various related parties later became evidence of the government's seriousness in resolving this issue. The aftermath of this seriousness is in the form of 2 positions from Thailand to a Tier position in resolving the issue of human trafficking. However, the Thai government still makes the issue of human trafficking a national priority.*

**Keywords:** Human Security, Human Trafficking, Multi Track Diplomacy, Thailand's Government.

### ABSTRAK

Kasus perdagangan manusia di Thailand telah ada sejak tahun 1970-an. Meskipun telah lewat lebih dari tiga dekade, kasus perdagangan manusia di Thailand masih saja ditemukan. Perdagangan manusia menjadi isu nyata yang dihadapi Thailand setiap tahunnya. Penelitian ini secara khusus membahas upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu fokus dalam konsep *human security*. Upaya yang ditempuh tersebut berupa kerja sama dengan berbagai sektor dalam cakupan konsep *Multi Track Diplomacy*. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka digunakan karena minimnya akses untuk melakukan pengumpulan data secara langsung, sehingga data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen serta publikasi yang tersedia di internet. Setelah melakukan proses penelitian, hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa Pemerintah Thailand melakukan enam dari sembilan jalur *Multi Track Diplomacy*. Keenam jalur kerja sama tersebut saling bersinergi dan menghasilkan aksi-aksi nyata dalam upaya Pemerintah Thailand untuk menangani perdagangan manusia. Kerja sama yang dilakukan Pemerintah Thailand dengan berbagai pihak terkait tersebut kemudian menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan isu ini. Buntut dari keseriusan ini berupa meningkatnya posisi Thailand ke posisi

Tier 2 dalam penyelesaian isu perdagangan manusia. Meski demikian, Pemerintah Thailand masih menjadikan isu perdagangan manusia menjadi prioritas nasional.

**Kata Kunci:** *Human Security, Multi Track Diplomacy*, Pemerintah Thailand, Perdagangan Manusia

## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kasus yang telah ada di Thailand sejak tahun 1970-an yang ditandai dengan penangkapan sekelompok orang yang hendak diselundupkan ke daerah Malaysia. Sekelompok orang ini akan diselundupkan melalui wilayah selatan Soghkla (Agustina, 2016). Meskipun telah lewat lebih dari tiga dekade, kasus perdagangan manusia di Thailand masih terus ditemukan hingga saat ini. Perdagangan manusia merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi di negara berkembang, salah satunya adalah yang terjadi di Thailand ini. Di Thailand persoalan perdagangan manusia tumbuh menjadi *problem malignancy* (Agustina, 2016). Hal tersebut karena terus meningkatnya korban perdagangan manusia di Thailand dari tahun ke tahun.

Pada fenomena perdagangan manusia, Thailand menempati tiga posisi. Pada posisi pertama Thailand sebagai negara asal menjadikan beberapa negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, United Kingdom, Australia, dan Jerman, sebagai destinasi perdagangannya (Roujanavong, 2013, p. 138). Pada posisi kedua, Thailand menjadi negara tujuan bagi para imigran yang berasal dari Laos, Myanmar, dan Kamboja (Asmardika, 2017) karena dianggap sebagai negara yang kaya (Misti, 2018). Alasan lain dijadikannya negara Thailand sebagai negara tujuan adalah karena letak geografis Thailand yang strategis bagi para *trafficker*. Sedangkan pada posisi ketiga Thailand dijadikan negara transit. Hal tersebut dikarenakan posisi Thailand yang tepat berada di tengah kawasan Asia Tenggara sehingga menjadikan Thailand menjadi pusat perjalanan yang menyediakan penerbangan internasional ke hampir seluruh tempat di dunia (Roujanavong, 2013, p. 141).

Pihak yang menjadi korban dalam aktivitas perdagangan manusia bersifat menyeluruh mulai dari anak-anak, wanita, bahkan pria. Para korban biasanya akan dipekerjakan paksa di industri perikanan, pabrik, pertanian, konstruksi, pekerja domestik, dan dijadikan pengemis (Strategic Information Response Network, 2010). Selain itu, korban juga dapat diperjual-belikan organ tubuhnya, dipekerjakan sebagai buruh, ataupun diperjual-belikan untuk dieksploitasi secara seksual (Roby & Tanner, 2009). Perdagangan manusia merupakan segala tindakan yang melingkupi pemindahan, penyelundupan atau penjualan manusia yang terjadi di dalam maupun luar negeri. Umumnya, sistem yang digunakan berbentuk ancaman, penipuan, penculikan, paksaan, dan memperdaya (Natarajan, 2015).

Pada tahun 2015 ditemukan kuburan massal yang berisi sisa-sisa tubuh manusia di wilayah Thailand bagian selatan. Kuburan massal tersebut ditemukan di sebuah perkemahan di daerah distrik Sadao yang terletak di Provinsi Songkhla yang dianggap sebagai pusat dari aktivitas perdagangan manusia di negara tersebut. Beberapa hari setelah kuburan massal tersebut ditemukan, Pemerintah Thailand telah berhasil mengidentifikasi 26 tubuh lainnya di daerah tersebut (Olarin & Hume, 2015).

Secara keseluruhan, kasus perdagangan manusia di Thailand sendiri mencapai 317 kasus pada 2015 dengan total korban sebanyak 982 korban (United States Department of State, 2017). Korban pada tahun 2015 tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya, yaitu 2014, yang awalnya hanya sebanyak 595 korban. Peningkatan jumlah kasus juga terjadi pada tahun 2016, yaitu mencapai 333 kasus. Kemudian pada tahun berikutnya kasus perdagangan manusia di Thailand mencapai 302 (Ministry of Social Development and Human Security of Thailand, 2017). Tingginya tingkat perdagangan manusia di Thailand menjadikan penyelesaian isu ini menjadi agenda penting negara (Sihotang & Wiriya, 2021).

Perdagangan manusia merupakan permasalahan yang termasuk ke dalam pembahasan dari konsep keamanan non-tradisional (Purnama et al., 2019). Konsep ini menitikberatkan pada standar keberadaan dan keberlangsungan hidup manusia, sehingga manusia seharusnya bebas dari berbagai macam rasa tidak aman. Menurut UNDP terdapat tujuh komponen hak-hak mendasar manusia, yaitu keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan komunitas, keamanan ekonomi, dan keamanan politik (Fitrah, 2015). Ketujuh komponen ini menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pemerintah setiap negara yang menjadi anggotanya (Fitrah, 2015).

Masih ditemukannya aktivitas perdagangan manusia membuat Thailand harus melakukan upaya lebih keras dalam memberantas perdagangan manusia di negaranya baik melalui kebijakan domestik maupun kerjasama dengan pihak-pihak lain. Melalui kebijakan domestik, Thailand telah menerapkan beberapa kebijakan, seperti *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996), undang-undang *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996), dan *Labour Protection Act* (2008).

Selain itu, dalam penyelesaiannya, sebuah negara perlu melakukan kerja sama yang melibatkan tidak hanya pihak pemerintah melainkan juga pihak-pihak lain di luar pemerintah (Misti, 2018). Hal tersebut karena fenomena kejahatan perdagangan manusia merupakan kejahatan terstruktur yang dalam pelaksanaannya membutuhkan peranan banyak pihak (Misti, 2018). Hal ini jugalah yang coba dilakukan oleh Pemerintah Thailand.

Dalam rangka memudahkan upaya pemberantasan perdagangan manusia, Pemerintah Thailand mengambil langkah-langkah diplomasi. Langkah diplomasi yang dilakukan Thailand tersebut merupakan implementasi dari *Multi Track Diplomacy* (MTD). Maka dari itu, pada penelitian ini peneliti akan berfokus kepada upaya MTD yang diambil oleh pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia secara keseluruhan pada tahun 2015-2017.

MTD merupakan suatu kerangka konsep yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan demi terwujudnya perdamaian (Mujiono & Alexandra, 2019). MTD menjelaskan mengenai banyaknya jalan yang dapat diambil oleh suatu negara untuk mewujudkan perdamaian bagi negaranya tersebut. Dalam konsep MTD terdapat sembilan *track* yang dapat dijalankan oleh suatu negara (Mujiono & Alexandra, 2019). Pada kasus perdagangan manusia yang terjadi, Pemerintah Thailand melakukan implementasi dari beberapa *track* MTD tersebut. Langkah-langkah tersebut diambil karena dianggap mampu membantu Pemerintah Thailand dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Namun tidak hanya itu, perdamaian juga menjadi tujuan lain yang ingin diraih oleh Pemerintah Thailand. Dipilih

rentang waktu 2015-2017 karena pada rentang waktu tersebut terjadi peningkatan yang signifikan pada kasus dan korban perdagangan manusia di negara ini dari berbagai jenis *trafficking*. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang akan dikaji yakni bagaimana upaya multi track diplomacy pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia di Thailand tahun 2015-2017?

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam studi terdahulu, penulis menggunakan beberapa artikel dari jurnal internasional sebagai perbandingan sudut pandang yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian ini. Berbagai penelitian yang dipilih memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti Kerjasama pemerintah Thailand dengan pihak lain termasuk International Non Governmental Organization (INGO), peran pemerintah Thailand dalam menghadapi berbagai bentuk perdagangan manusia termasuk eksploitasi seksual, perdagangan organ dan lainnya

Literatur pertama berupa artikel jurnal ilmiah dengan judul 'Peran UN Women Dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan' yang ditulis oleh Mira Dymas Oryza. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Kerjasama yang dijalin Thailand dengan INGO dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menanggulangi masalah perdagangan Perempuan. Pemerintah Thailand memutuskan menjalin Kerjasama dengan UN Women karena Thailand tidak mampu mengatasi korban perdagangan manusia yang semakin meningkat di mana tulisan ini juga menjelaskan secara rinci sebab munculnya eksploitasi perempuan. UN Women dalam hal ini mempengaruhi proses ratifikasi Konvensi CEDAW yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam merevisi atau memperbaiki UU Perdagangan Perempuan di Thailand yakni dengan cara UN Women bekerja sama dengan berbagai negara untuk mengadakan konvensi internasional yang dibantu oleh PBB untuk membahas kasus perdagangan manusia khususnya perempuan yang dialami negara berkembang dan miskin (Oryza, 2016).

Selain itu UN Women juga tetap terus mengawasi pelaksanaan UU yang telah direvisi serta diterapkan oleh masing-masing negara. UN Women mengatur dan mengawasi negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk secara serius dalam menanggapi korban perdagangan manusia yakni hasil dari ratifikasi Konvensi CEDAW oleh Pemerintah Thailand yakni berupa revisi atau perbaikan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia yang disahkan pada tahun 2008. Pada Undang-Undang pidana anti perdagangan manusia di Thailand melarang semua bentuk perdagangan dan menetapkan hukuman dari 4 sampai 10 tahun penjara (Oryza, 2016).

Tulisan ini memberikan informasi penting terkait bagaimana kerjasama pemerintah Thailand dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia dengan INGO serta bagaimana perdagangan manusia khususnya melalui jalur eksploitasi Perempuan sulit dicegah. Pemerintah Thailand sangat bergantung pada sektor industri prostitusi sebab penghasilan pajak yang dihasilkan sangat besar dalam APBN negara Thailand. Namun, di sisi lain penghasilan pajak negara yang sangat besar tersebut berakibat pada meningkatnya tingkat kejahatan terhadap anak-anak dan Perempuan yang mana ini menunjukkan terdapat tantangan besar dalam mencegah perdagangan manusia di Thailand sehingga masalah perdagangan manusia akan terus terjadi sebagai akibat peluang kejahatan yang dibuka sendiri oleh pemerintah Thailand. Adapun perbedaan

penelitian terletak pada fokus dan kerangka pemikiran yang digunakan, di mana penelitian ini membahas diplomasi *multi track* pemerintah Thailand dalam menangani perdagangan manusia tahun 2015-2017 menggunakan konsep keamanan manusia dan *Multi track Diplomacy*, sedangkan penelitian oleh Mira dymas Oryza lebih membahas sisi teoritik Kerjasama UN Women dengan Thailand dari sisi teori rezim internasional.

Artikel selanjutnya merupakan jurnal ilmiah dengan judul 'Upaya Thailand dalam Mengatasi Prostitusi sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) melalui Kerjasama Internasional' yang ditulis oleh Intan Nurul. Artikel ini menjelaskan bagaimana wisata prostitusi dapat membawa dampak positif dan negatif bagi Thailand serta Upaya Thailand dalam re-branding pariwisata yang kental dengan wisata seks. Artikel ini juga menjelaskan Upaya pemerintah Thailand dalam melakukan Kerjasama internasional seperti Kerjasama yang dilakukan Thailand dengan UNICEF untuk memberantas prostitusi atau kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dibawah umur. Wujud nyata Kerjasama ini seperti Program Child Protection di mana kedua pihak mengadakan workshop terkait bahaya HIV, bentuk pelecehan dan kekerasan seksual serta dampak negatifnya. UNICEF juga memberikan system perlindungan anak yang telah dipasang di 135 kecamatan di Thailand Selatan, Tengah dan Timur Laut untuk mengumpulkan data anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Thailand juga bergabung dalam kegiatan COOMIT, yakni aliansi berbagai negara untuk memberantas perdagangan orang. Selain itu, Thailand juga aktif bekerjasama dengan Lembaga PBB lain yakni UNIAP dengan melakukan Kerjasama berupa kampanye anti perdagangan manusia serta melakukan penyelamatan langsung terhadap korban (Nurul et al., 2023).

Tulisan ini memberikan informasi penting seputar berbagai Upaya Kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Thailand serta memberikan kesediaan data terkait peningkatan jumlah perdagangan manusia beserta faktor-faktor di dalamnya (wilayah Thailand yang strategis, masalah ekonomi warga dan lainnya yang menjadi informasi penting dalam penulisan ini. Sayangnya, tulisan ini hanya fokus pada upaya maupun keberhasilan pemerintah dalam mengurangi masalah perdagangan manusia tanpa menjelaskan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian yang dibahas, di mana penelitian oleh Intan Nurul membahas Kerjasama internasional oleh Thailand dari sisi kajian hukum dan tidak membahas dari sisi diplomasi, sedangkan penelitian ini membahas diplomasi pemerintah Thailand menggunakan *Multi track Diplomacy* sehingga hasil kajiannya akan berbeda dengan tulisan oleh Intan Nurul.

Tulisan terakhir merupakan skripsi dengan judul 'Implementasi Kebijakan 5P Strategy Framework Thailand dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Lintas Negara di Sektor Perdagangan Manusia' yang ditulis oleh Tamara Alda Chairunnisa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pemerintah Thailand dalam menangani ancaman kejahatan lintas negara melalui 5P Strategy Framework yang meliputi *Policy* (kebijakan), *Prosecution* (penuntutan), *Protection* (perlindungan), *Prevention* (pencegahan) dan *Partnership* (Kerjasama) di mana dalam hal ini perdagangan manusia menjadi agenda nasional pemerintah sehingga ini membuktikan keseriusan pemerintah menangani perdagangan manusia di negaranya. Bentuk keseriusan ini bisa dilihat pada kurun waktu 2017 sampai 2020 di mana jumlah perdagangan manusia mengalami penurunan meskipun pada tahun 2018 sempat naik, pemerintah Thailand segera melakukan

evaluasi melalui kebijakan *Zero Tolerance* terhadap tindak kejahatan perdagangan manusia (Chairunnisa, 2021).

Tulisan ini memberikan informasi penting terkait upaya keseluruhan pemerintah Thailand dalam mencegah kejahatan perdagangan manusia melalui kebijakan 5P yang mana salah satunya berupa Kerjasama internasional yang tentu dalam prosesnya melalui diplomasi meskipun tulisan tersebut tidak spesifik membahas kajiannya menggunakan diplomasi. Dalam analisisnya, penelitian ini memberikan informasi penting terkait hasil implementasi kebijakan 5P dalam mengurangi kasus perdagangan manusia. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus kajian serta kerangka konsep yang digunakan, di mana penelitian oleh Tamara Alda Chairunnisa lebih membahas secara menyeluruh kebijakan 5P, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Kerjasama internasional melalui *multi track* diplomacy di mana dalam implementasinya terdapat 9 track dalam MTD yang dilaksanakan oleh pemerintah Thailand dalam Upaya mencegah perdagangan manusia sehingga focus kajiannya akan sangat berbeda dengan penelitian oleh Tamara Alda Chairunnisa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan dipilihnya jenis penelitian tersebut karena karena peneliti ingin memperoleh pengetahuan mendalam mengenai kronologi perdagangan manusia di Thailand tahun 2015-2017 serta program pemerintah Thailand khususnya dalam poin kerjasama dengan negara lain sebagai upaya penanganan masalah perdagangan manusia di negara tersebut.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alasan dipilihnya jenis dan sumber data tersebut karena keterbatasan peneliti sehingga tidak memungkinkan melakukan pengambilan data secara langsung. Data sekunder yang digunakan berupa dokumentasi baik dari artikel berita, jurnal, maupun penelitian terdahulu untuk menganalisis peristiwa tersebut. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu studi literatur (*library research*). Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

### **MULTI TRACK DIPLOMACY**

Perdagangan manusia merupakan kejahatan luar biasa yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan celah yang ada di suatu negara (Winterdyk, 2020). Fenomena ini juga dipahami sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lintas negara. Hal tersebut memiliki arti dalam menjalankan aksinya para *trafficker* membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak di negara lain. Maka dari itu negara-negara dengan permasalahan perdagangan manusia ini juga memerlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar negara.

Kerja sama tersebut disebut dengan diplomasi. Menurut Holsti (1992) diplomasi merupakan cara formal yang dilakukan suatu negara untuk mencapai kepentingan negaranya dengan cara damai serta memastikan tercapainya keuntungan maksimum negara sendiri serta kepentingan jangka panjang yaitu pemeliharaan keamanan (Prayuda & Sundari, 2019). Dalam buku *Guide to Diplomatic Practice*, Sir Earnest Satow

menyatakan bahwa diplomasi adalah pengimplementasian kepandaian dan taktik pada pelaksanaan relasi resmi yang terjadi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat, menurut Satow (1917) dalam Prayuda (2019). Diplomasi dapat juga diartikan sebagai proses komunikasi dua arah antara dua negara yang dilakukan sebagai upaya untuk meraih tujuan politik luar negerinya masing-masing (Roy, 1995).

Pada tahun 1982 Joseph Montville mengembangkan definisi suatu perluasan dan pembedaan dari *first track diplomacy* dan *second track diplomacy* yang disebut dengan *Multi track Diplomacy* (MTD) (Diamond & McDonald, 1996). *First track* atau yang bisa disebut dengan diplomasi tradisional berkonsentrasi pada dialog antar pejabat dalam menangani konflik (Wehrenfennig, 2008). Hal tersebut berarti dalam menangani suatu konflik selalu melalui sudut pandang dari politikus maupun pejabat militer negara tersebut (Wehrenfennig, 2008). Sedangkan *second track* atau *track two* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang terjalin antara pihak-pihak tertentu yang dilaksanakan oleh para kalangan profesional dengan membawa misi-misi tertentu (Mujiono & Alexandra, 2019). Pihak-pihak tersebut antara lain yaitu dari kalangan profesional, kelompok-kelompok tertentu, dan individu (Mujiono & Alexandra, 2019).

MTD merupakan sebuah paradigma tentang proses terciptanya perdamaian dunia dalam sistem internasional yang terbentuk lewat perpaduan diplomasi jalur kelompok, diplomasi jalur pemerintahan, serta diplomasi jalur individu (Diamond & McDonald, 1996). MTD memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia hingga *peacebuilding* melalui *soft power* (Notter & Diamond, 1996). MTD dalam resolusi konflik bagi *peacebuilding* dan *peacemaking* yang pada tahun 1989 oleh McDonald ditambahkan menjadi lima *track*. Kemudian pada 1991 bersama Diamond, McDonald mengembangkan lagi *multitrack* tersebut menjadi sembilan *track* (McDonald, 2012).

*Track one diplomacy* merupakan diplomasi yang ditempuh oleh negara dan lebih dikenal dengan sebutan diplomasi tradisional atau diplomasi resmi. *Track one* melakukan segala usaha *conflict resolution* lewat jalur resmi dan juga oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang melekat pada suatu negara (Mujiono & Alexandra, 2019). Proses diplomasi dan negosiasi yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara umumnya bersifat prosedural, formal, serta birokratis (Mujiono & Alexandra, 2019).

Kemudian ada *track two*. *Track two* merupakan ranah non-pemerintah atau profesional yang berusaha menganalisis, menyelesaikan, dan mengelola konflik internasional oleh aktor non-negara. *Track two* dapat juga diartikan sebagai kemampuan pihak-pihak non-pemerintah atau profesional dalam mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik (Saputra, 2019).

Pada mulanya, khususnya pada sekitar tahun 1980-an, aktivitas *track two* hanya mengikutsertakan *professional actor*, praktisi, dan kalangan akademisi. Akan tetapi memasuki tahun 1990-an aktor-aktor lain yang memiliki fokus terhadap terciptanya perdamaian dunia mulai bermunculan (Mujiono & Alexandra, 2019, p. 3). Mujiono dan Alexandra (2019) meneruskan bahwa menciptakan suatu perdamaian dunia bukan hanya merupakan tanggung jawab negara atau pemerintahan saja namun juga dapat dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Tujuan dari *track* ini yaitu untuk menciptakan perdamaian lewat resolusi konflik melalui cara analisis, pencegahan, mengatasi dan juga mengelola konflik di tingkat internasional yang dilakukan oleh *non-state actor* (Institute for Multi-Track Diplomacy, n.d.).

Setelah *track two*, ada *track three* yang digambarkan sebagai bentuk dari masyarakat sipil yang perannya melampaui batas kebangsaan atau non-government. Jaringan sosial dan aktivitas yang dimiliki oleh *track three* justru merupakan perkembangan penting dalam praktik diplomatik kontemporer (Kraft, 2002). Hal ini diwujudkan dalam bidang bisnis dan efek aktual serta potensialnya terhadap pembangunan perdamaian melalui penyediaan peluang ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal, dan dukungan untuk kegiatan perdamaian lainnya (McDonald, 2012).

*Track* selanjutnya yaitu *track four*. *Track four* merupakan jalur yang ditempuh untuk mewujudkan perdamaian melalui jalur private atau individu. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berupa pertukaran program, organisasi sukarelawan, NGO, dan kelompok-kelompok minat khusus (Hossain, n.d.).

Kemampuan penyelesaian masalah oleh *private citizen* yang dilakukan oleh para pelakunya karena kelompok ini bekerja di berbagai organisasi yang memiliki peranan langsung pada hubungan internasional (Mujiono & Alexandra, 2019). Keuntungan lain dari dilakukannya diplomasi melalui *track* ini yaitu adanya strategi khusus yang digunakan, yaitu melalui jalur *grass roots* (Mujiono & Alexandra, 2019).

Lalu ada *track five* yang berfokus pada upaya pencapaian perdamaian melalui jalur penelitian, pendidikan, dan pelatihan. Pada *track* ini hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan menjadi fokus aktifitas diplomasi yang dijalankan (Diamond & McDonald, 1996). Terdapat tiga kajian dalam *track* ini, yang pertama yaitu penelitian yang mempunyai relasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Kajian yang kedua berupa *think tanks* yang memiliki relasi dengan pendidikan, program studi, serta analisis. *Track* selanjutnya yaitu *track six*. *Track six* mengacu pada diplomasi yang berfokus pada upaya pencapaian perdamaian melalui jalur kegiatan aktivisme. *Track six* sering digunakan untuk mengatasi isu dan permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti isu sosial-ekonomi dan hak asasi manusia (Diamond & McDonald, 1996).

Kemudian ada *Track seven* yaitu diplomasi yang berfokus pada upaya mencapai perdamaian melalui jalur keyakinan atau agama. Keyakinan atau agama diyakini dapat membantu pencapaian perdamaian karena kedua hal tersebut merupakan hal mendasar bagi kehidupan manusia yang dapat mempengaruhi perilaku. *Track seven* memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu atau masalah terkait dengan pendekatan nilai-nilai luhur bagi aktor terkait.

*Track* yang ke 8 yaitu diplomasi yang berfokus pada pendanaan dalam upaya mencapai perdamaian. Pendanaan dalam *track eight* ini dapat berupa pendanaan langsung untuk lembaga terkait atau pendanaan untuk siswa-siswa melanjutkan studinya ke luar negeri berupa beasiswa. Pendanaan ini dinilai dapat membantu aspek ekonomi dari masyarakat terdampak isu atau masalah yang sedang dikaji.

Kemudian *track* yang terakhir adalah *Track nine*. *Track nine* merupakan diplomasi dengan pendekatan penggunaan media dan sarana komunikasi. Perkembangan teknologi membuat *track nine* ini dapat membantu penyebaran informasi yang transparan dan menyeluruh kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan perdamaian.

Berdasarkan penjelasan mengenai strategi pemerintah Thailand dalam menghadapi dan menangani kasus perdagangan manusia diatas, maka MTD merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam membantu peneliti menjawab



rumusan masalah yang sudah peneliti rumuskan serta tujuan penelitian yang peneliti harapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana definisi MTD sesuai dengan bagaimana pemerintah Thailand menghadapi dan menangani kasus perdagangan manusia melalui kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah Thailand.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus perdagangan manusia di Thailand telah ada sejak tahun 1970-an (Agustina, 2016). Perdagangan manusia sendiri secara legal berdasarkan Anti-Trafficking in Persons Act (B.E. 2551/2008) didefinisikan dengan 3 elemen utama, yaitu tindakan untuk mendapatkan, membeli, menjual, membawa dari suatu tempat atau mengirim ke suatu tempat, menahan atau mengurung, menyimpan, atau menerima manusia; Dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian bayaran untuk mencapai sebuah persetujuan dari seseorang; Dengan tujuan untuk memiliki kendali atas orang lain untuk dieksploitasi (Strategic Information Response Network, 2010).

Upaya yang sudah dilakukan Thailand untuk memerangi perdagangan manusia pun juga beragam. Sejarah memerangi perdagangan manusia ini dimulai pada tahun 1979 ketika Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang yang memungkinkan diberikannya hukuman berat bagi pelaku yang dinyatakan bersalah, baik individu maupun kelompok dengan tuduhan yang meliputi prostitusi, eksploitasi tenaga kerja, pengemis paksa, dan tindakan-tindakan lainnya (Rochma, 2021). Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah: *Immigration Act* (1979), *Amendments to The Securities and Exchange Act* (1992), *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996), *Criminal Procedure Amendment Act* (1997), *Penal Code Amendment Act* (1997), *Anti-Money Laundering Act* (1999), *Child Protection Act* (2003), *Labour Protection Act* (2008) (Strategic Information Response Network, 2010).

Diantara kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan di atas, beberapa di antaranya dianggap kurang efektif. Contohnya yaitu pada kebijakan *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996) yang dianggap belum berhasil karena belum mampu mencakup seluruh keselamatan manusia terhadap perdagangan manusia, khususnya kepada laki-laki. Menurut [hummantrafficking.org](http://hummantrafficking.org) dalam Widhi (2018), kebijakan ini dinilai hanya ditujukan untuk wanita dan anak-anak saja sehingga perbaikan perlu dilakukan agar hukum yang berlaku dapat mencakup seluruh kalangan.

Contoh lainnya adalah pada penerapan undang-undang *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996). Walaupun undang-undang ini telah diterapkan dengan tuntutan-tuntutan hukum yang tertera dalam undang-undang, fakta di lapangan menunjukkan pariwisata seks di Thailand justru berkembang pesat (Reyes, 2015). Perkembangan tersebut berakar pada faktor agama, budaya dan ekonomi.

Bales (2012) dalam Reyes (Reyes, 2015) mengungkapkan bahwa peran agama dan stratifikasi gender turut melanggengkan praktek prostitusi ini. Pemahaman Buddhis yang dipercaya masyarakat di Thailand menempatkan perempuan pada status yang jauh lebih rendah daripada laki-laki. Buntutnya, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Masyarakat dan LSM, ada lebih dari 120.000 pekerja seks perempuan ilegal di Thailand saat ini (Reyes, 2015). Melihat data dan fakta di lapangan tersebut, maka undang-undang ini dapat dikatakan belum berjalan dengan efektif.

Selain itu, pada tahun 1998, Kepolisian Nasional Thailand yang telah menerapkan undang-undang *Prevention and Suppression of Prostitution Act* (1996) ini juga menghadapi masalah ketika para korban perdagangan manusia dapat menyamar keluar Thailand dan kemudian bekerja di luar negeri sebagai pekerja seks komersil (Agustina, 2016)

Kegagalan lainnya terjadi setelah ditetapkannya *Labour Protection Act* pada tahun 2008. Pada tahun 2008-2012, Raja Thailand, Bhumibold Adulyadej melakukan pendekatan sosial dan budaya dengan memberikan maklumat sekitar delapan kali melalui media elektronik dan cetak Thailand untuk mendukung penetapan *Labour Protection Act*. Raja Bhumibold Adulyadej menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan serius, namun terlepas dari usaha Raja Bhumibold Adulyadej tersebut, usaha ini juga belum dapat menjadi upaya yang efektif (Agustina, 2016). Hal tersebut dikarenakan progres dalam penerapan undang-undang anti-perdagangan manusia tahun 2008 yang baru berjalan lambat. Laporan TIP 2012 mencatat bahwa jumlah penuntutan dan hukuman yang dilakukan untuk perdagangan seks dan tenaga kerja sangat kecil dibandingkan dengan cakupan dan besarnya perdagangan yang signifikan di Thailand (Pink, 2013).

Ketidakefektifan upaya pemerintah Thailand ini berujung pada justru meningkatnya kasus perdagangan manusia di Thailand di tahun 2015 dan mencapai puncak kenaikan pada tahun 2016. Berdasarkan data dari Royal Thai Police mengenai jumlah kasus perdagangan manusia 2014-2018, pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus perdagangan manusia sebanyak 317 (Rochma, 2021). Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 jumlah kasus perdagangan manusia sebanyak 280. Sedangkan pada puncak kenaikan jumlah kasus di tahun 2016, terdapat sebanyak 333 kasus.

Kegagalan-kegagalan dari penerapan kebijakan terdahulu itulah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Thailand terus berupaya mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan manusia di negara tersebut. Selain itu bukan hanya hasil yang ingin diperoleh Pemerintah Thailand tetapi juga tercapainya perubahan mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih besar dalam usaha pemberantasan perdagangan manusia di Thailand (Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand, 2015).

Maka dari itu pada 2015 Pemerintah Thailand memutuskan untuk menjalankan kebijakan baru yang dikenal dengan nama *5 Plan (5P) Strategy Framework*. Diterapkannya kebijakan ini dilatarbelakangi dengan adanya insiden nasional di negara ini yang melibatkan banyak pihak penting, salah satunya yaitu pejabat tinggi angkatan darat Thailand. Kasus perdagangan manusia ini turut menyeret seorang Letnan Jenderal Angkatan Darat Thailand, Manas Kongpan (Promyamyai & Mairs, 2017).

*5P Strategy Framework* meliputi 5 faktor, yaitu *policy* (kebijakan), *prosecution* (penuntutan), *protection* (perlindungan), *prevention* (pencegahan), dan *partnership* (kemitraan) (Agustina, 2016, p. 510). Konsep 5P ini sendiri sudah dirancang Pemerintah Thailand sejak tahun 2010 dan baru resmi diberlakukan pada 2015. Pemberlakuan 5P ini juga didorong oleh sulitnya memerangi masalah perdagangan manusia dengan pendekatan hukum, ekonomi dan kesejahteraan (Misti, 2018). Oleh karena itu, Thailand turut menggalakkan kerjasama dengan pihak luar dalam rangka memerangi

perdagangan manusia ini. Kerjasama ini merupakan salah satu implementasi dalam strategi 5P yaitu poin *partnership*.

*Partnership* merupakan salah satu kebijakan dari 5P dimana Pemerintah Thailand bekerjasama dengan pihak-pihak luar baik dengan aktor nasional maupun internasional. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand tersebut antara lain kerjasama dengan *Public, Private Civil Society Partnership (PPCSP)*, *International Organization for Migration (IOM)*, hingga kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara barat.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Thailand tersebut merupakan bentuk implementasi MTD. MTD merupakan suatu hasil dari pengembangan definisi perluasan dan pembedaan dari *first track diplomacy* dan *second track diplomacy* yang dicetuskan oleh Joseph Montville pada 1982 (Diamond & McDonald, 1996). MTD merupakan sebuah paradigma tentang proses terciptanya perdamaian dunia dalam sistem internasional yang terbentuk lewat perpaduan diplomasi jalur kelompok, diplomasi jalur pemerintahan, serta diplomasi jalur individu (Diamond & McDonald, 1996).

MTD dalam hal ini berperan sebagai landasan dari upaya yang diambil oleh Pemerintah Thailand untuk memerangi perdagangan manusia yang terjadi. Seperti yang sudah dijabarkan di atas bahwa Pemerintah Thailand menggalakkan kerjasama-kerjasama untuk memerangi perdagangan manusia, beberapa contoh dari kerja sama tersebut antara lain: Pertama, Pemerintah Thailand mengadakan kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan negara-negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja untuk menangani atau mengontrol arus migrasi. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas prosedur migrasi untuk pekerja migran, efektifitas pemulangan pekerja migran, dan pencegahan perdagangan pekerja ilegal hingga pekerjaan ilegal (Rahmah, 2015).

Kerjasama kedua yang dilakukan Pemerintah Thailand adalah kerjasama dengan International Labour Organization (ILO). Kerjasama tersebut menghasilkan kerangka kerja dengan tujuan melanggengkan keadilan sosial sebagai dasar dari perdamaian internasional. Hal tersebut dilakukan dengan menjamin hak dasar setiap warganegara dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak (Rahmah, 2015).

Secara lebih lengkap, berikut merupakan tabel kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand pada tahun 2016-2017. Meskipun kebijakan 5P *Strategy Framework* ini telah dicanangkan sejak tahun 2015 namun memang belum ada bentuk kerja sama yang dilakukan pada taun tersebut. Hal ini karena pada tahun 2015 pihak Pemerintah Thailand sedang melakukan persiapan untuk menjalankan kebijakan ini sehingga saat kebijakan 5P *Strategy Framework* ini dilaksanakan Pemerintah Thailand dan semua pihak yang terlibat memiliki pedoman. Berikut tabel beserta hasil pengelompokan kerjasama pada *track-track* yang terkandung dalam MTD:

Tabel 1. Tabel Klasifikasi MTD Thailand Tahun 2016-2017

<b>Track</b>	<b>Kerjasama</b>
1	16 Kerjasama
2	12 Kerjasama

3	3 Kerjasama
5	1 Kerjasama
8	6 Kerjasama
9	9 Kerjasama

Sumber: (Ministry of Social Development and Human Security of Thailand, 2017; Royal Thai Embassy, 2017; UN-ACT, 2018)

Bentuk kerja sama di atas merupakan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Thailand pada tahun 2016-2017 yang sudah peneliti kurasikan. Pada tabel di atas tidak nampak bentuk kerjasama yang termasuk ke dalam *track* 6 dan *track* 7. Hal tersebut dikarenakan baik berdasarkan laporan Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2016 dan 2017 maupun report pihak ketiga yang dirilis oleh UNACT tahun 2017 tidak peneliti temukan kerjasama yang termasuk ke dalam *track* 6 dan *track* 7. Lebih lanjut lagi peneliti akan menganalisis secara deskriptif berdasarkan pada data temuan di atas. Analisis data diatas peneliti lakukan dengan membedah satu per satu *track* dalam MTD, mulai dari *track* 1 hingga *track* 9:

*Track* 1 adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor kenegaraan atau pemerintah dengan aktor kenegaraan atau pemerintah lainnya. Hal tersebut berarti setiap kerjasama yang dilakukan Pemerintah Thailand melibatkan badan pemerintahan negara dengan tujuan untuk memudahkan pergerakan setiap kerjasama dalam upaya memerangi perdagangan manusia. Berdasarkan tabel di atas penerapan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Thailand yaitu dengan melakukan kerjasama antara Pemerintah Thailand dengan pemerintah negara-negara lain seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Jepang, Uni Emirat Arab.

Pemerintah Thailand bersama masing-masing negara tersebut berhasil mengesahkan beberapa Memorandum of Understanding (MoU). MoU tersebut mayoritas berisi mengenai pencegahan dan penanganan perdagangan manusia yang terjadi, seperti halnya MoU antara Thailand dengan Kamboja mengenai rencana memerangi perdagangan manusia yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016 (Royal Thai Embassy, 2017).

Thailand bersama beberapa negara lainnya, seperti Myanmar dan Laos juga terus melakukan perbaikan terhadap kerjasama yang telah dilakukan. Tujuan dari dilakukannya peninjauan ulang tersebut yaitu untuk memperbaiki isi dari MoU sehingga menjadi lebih relevan dengan perubahan masanya. Hal ini dikarenakan para pelaku perdagangan manusia cukup adaptif terhadap perkembangan jaman, sehingga dikhawatirkan mereka akan dengan mudah melakukan aksi mereka kembali dengan memanfaatkan celah-celah yang ada. Bentuk implementasi terhadap MoU ini bisa dilihat dari pemerintah Thailand yang melakukan pemantauan dengan mendirikan 10 kantor Thailand Overseas employment Administration (TOEA) untuk menjadi pusat pelayanan bagi pekerja migran yang ada di Thailand untuk melindungi mereka dari ancaman kemungkinan kejahatan perdagangan manusia. Tidak hanya itu, bentuk implementasi MoU lainnya bisa dilihat dari perlindungan terhadap anak-anak, Perempuan dan

pengemis dengan membuat program kesadaran terhadap perdagangan Perempuan, anak dan perdagangan pengemis.

Pemerintah Thailand juga melibatkan berbagai lembaga negara terkait. Contohnya adalah adanya kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Thailand dengan Pusat Penyelundupan dan Perdagangan Manusia di Washington DC pada September 2016. Kerjasama tersebut berbentuk pertukaran informasi dengan tujuan untuk membuat *database* mengenai kasus perdagangan manusia. Selain itu, kedua belah pihak juga berencana untuk bekerjasama di bidang lainnya dalam upaya memerangi perdagangan manusia (Royal Thai Embassy, 2017).

Upaya MTD melalui *track 1* yang ditempuh Thailand juga melalui kerjasama dengan negara-negara seregional yang tergabung dalam CLMVT (Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand). Kerjasama regional lainnya yang dilakukan Thailand adalah COMMIT. COMMIT yang beranggotakan negara-negara di sekitar Sungai Mekong ini pada tahun 2016 menghasilkan kerjasama berupa dibentuknya Sub-regional Plans of Action (SPA) yang merupakan implementasi dan realisasi MoU yang telah ditandatangani negara anggota pada tahun 2004. Praktek SPA kemudian melibatkan kerjasama-kerjasama dengan CSO lainnya yang akan dibahas di *track 2* setelah pembahasan mengenai *track 1* selesai.

Setelah COMMIT, Thailand juga bekerjasama dalam ASEAN Framework. ASEAN Framework menghasilkan 2 bentuk kerjasama, yaitu diskusi dan pembuatan draft rencana aksi ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia, terutama wanita dan anak-anak. Selain diskusi dan pembuatan draft tersebut, melalui ASEAN Framework, Thailand berkomitmen untuk secara aktif melakukan kerjasama dengan negara anggota ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia.

Sedangkan untuk *Track 2*, ada dua contoh kerjasama monumental yang dilakukan. Kerjasama monumental yang dimaksud di sini adalah kerjasama dengan aksi konkrit serta hasil yang terlihat. Contoh pertama adalah dibangunnya Migrant Worker Assistance Center. Migrant Worker Assistance Center merupakan sebuah pencapaian yang memiliki hasil konkrit karena adanya bangunan fisik yang disediakan di 10 provinsi dengan populasi pekerja migran yang tinggi serta pembinaan dan pendampingan terhadap pekerja migran di provinsi-provinsi tersebut. Selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2016, pusat bantuan yang telah dibangun tersebut telah membina lebih dari 14.000 pekerja migran dan dari jumlah tersebut tidak ada yang terjaring atau menjadi korban dalam perdagangan manusia. Contoh kedua adalah Open Heart to Combat Trafficking in Persons. Open Heart Trafficking in Persons merupakan sebuah forum yang telah berhasil meningkatkan kepercayaan serta pembuatan proyek dengan hasil nyata seperti adanya sistem pesan instan untuk lembaga pemerintah dan NGO terkait yang memungkinkan akses langsung ke masing-masing pihak terkait.

*Track* selanjutnya yaitu *track 3*. Melalui *track* ini Pemerintah Thailand berusaha mengatasi isu perdagangan manusia yang terjadi lewat kerjasama bisnis. Jalur bisnis memiliki dampak yang efektif dan peluang yang potensial untuk mewujudkan perdamaian lewat kerjasama-kerjasama ekonomi.

Pada kasus kerjasama yang dijalankan Pemerintah Thailand ini dapat dikatakan sebagai kerjasama yang tepat sasaran. Ketepatan sasaran tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama Kementerian Luar Negeri Thailand dengan beberapa sektor bisnis swasta dari Amerika Serikat seperti National Fisheries Institute, Red Lobster, dan

Walmart. Kerjasama tersebut adalah kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi mengenai bisnis dan industry perikanan serta pembukaan peluang-peluang kerjasama dengan stakeholder Thailand lainnya. Menurut data yang dirilis oleh ILO pada tahun 2006 dalam Kompas.com (2020), sektor industry perikanan di Thailand merupakan sector yang sangat rentan akan perdagangan manusia. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kerjasama ini merupakan kerjasama yang tepat sasaran dalam memerangi perdagangan manusia yang sedang dihadapi oleh Thailand.

Upaya memerangi perdagangan manusia harus dilakukan melalui berbagai aspek, salah satu aspeknya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu poin yang menjadi fokus dalam teori MTD yaitu pada *track 5*. *Track 5* merupakan diplomasi yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan juga pelatihan secara general.

Secara lebih khusus dalam penelitian ini peneliti menemukan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelatihan memiliki dampak yang konkrit. Hal tersebut dibuktikan dengan diadakannya pelatihan terhadap 1800 anggota kepolisian Thailand mengenai identifikasi dan investigasi korban TIP. Selain pelatihan identifikasi dan investigasi tersebut, representasi Thailand juga didanai oleh Amerika Serikat untuk mengikuti pelatihan yang berfokus pada TIP dan perdagangan manusia serta eksploitasi anak di industry perikanan. Keuntungan yang dicapai melalui dijalankannya kerjasama melalui *track 5* ini yaitu tersedianya pendidikan dan pelatihan antarnegara secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan kerjasama diatas yang telah dilakukan sejak November 2015 hingga September 2016.

*Track* selanjutnya yang ada dalam tabel yaitu *track 8*. Pada *track* ini pelaksanaan diplomasi berupa pemberian bantuan pendanaan. Bantuan pendanaan yang menjadi sorotan dalam *track* ini kerjasama Thailand dengan Amerika Serikat (AS) dalam hal panduan pendanaan. Pendanaan tersebut berupa sokongan dana yang disediakan oleh US Department of State sebesar 1,4 Juta Dollar AS. Dana tersebut disalurkan pada NGO-NGO seperti inter alia, ZOE international, New Life Center, dll.

Kerjasama lainnya yaitu pendanaan oleh Pemerintah Amerika Serikat melalui kerjasama antara World Vision Foundation of Thailand dengan Kedutaan Besar AS di Thailand dalam Anti-Human Trafficking Workshop 2016. Kemudian pendanaan yang menjadi sorotan lainnya adalah pendanaan tahunan oleh USAID yang disalurkan untuk segala proyek serta aktivitas yang berkaitan dengan pemberantasan perdagangan manusia di Thailand. Hal ini sejalan dengan fokus dari dijalankannya *track 8* yaitu pemberian modal dan pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Track* terakhir yang peneliti temukan dalam beberapa laporan yang menjadi acuan adalah *track 9*. *Track 9* merupakan diplomasi yang berhubungan dengan segala komunikasi serta publikasi media. Diplomasi yang terjadi dalam *track 9* ini memiliki kekuatan pada transparansi kepada masyarakat mengenai isu terkait melalui publikasi media, penyediaan sarana komunikasi hingga penggunaan teknologi canggih yang berhubungan dengan media dan komunikasi.

Sebagai contoh nyata dari *track* ini adalah kerjasama antara Kementerian Luar Negeri Thailand dan Kedutaan dengan AP dan New York Times. Kerjasama tersebut merupakan komitmen untuk secara konsisten meningkatkan akurasi informasi, pembaharuan informasi yang konstan, riset, pengawasan sumber daya, dan yang menjadi hal terpenting adalah koordinasi pembuatan database dan mengembangkan

platform untuk penyebaran informasi agar tepat sasaran dalam upaya memerangi perdagangan manusia.

Selain kerjasama dengan media Amerika Serikat di atas, kerjasama ini juga melibatkan pihak berwenang Thailand dengan jurnalis lokal dan internasional lainnya dengan memberi akses pada jurnalis dari media lokal dan internasional ini untuk ikut serta dengan petugas berwenang dalam tugas lapangannya. Sebagai contohnya adalah keikutsertaan 7 Day News Journal dalam upaya pemulangan ABK Thailand dari Indonesia, Nikkei dan Aljazeera yang ikut serta dalam inspeksi laut oleh Kapal Yang Mulia Raja Thailand (KYMRT) pada 17 November dan 16 Desember 2016, dan keikutsertaan Berna News, AP, Reuters, dan Nikkei serta media lokal lainnya dalam kunjungan ke Fisheries Monitoring Center dan juga inspeksi laut pada 9 Desember 2016.

Berdasarkan penjelasan yang sudah peneliti jabarkan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Thailand menempuh berbagai macam bentuk kerjasama sebagai upaya penanganan fenomena perdagangan manusia di negara mereka. Kerjasama-kerjasama yang dilakukan Pemerintah Thailand di atas saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain.

Upaya-upaya yang dijalankan Pemerintah Thailand selama kurang lebih 2 tahun tersebut membuahkan hasil yang cukup baik. Melalui berbagai kerja sama yang dijalankan tersebut Thailand berhasil naik ke posisi Tier 2 Watch List. Posisi ini merupakan pencapaian positif karena pada beberapa tahun sebelumnya Thailand menempati posisi Tier 3. Tier 3 merupakan posisi terendah bagi pemerintah suatu negara dalam hal pemberantasan isu perdagangan manusia. Tidak hanya itu, melalui strategi 5P khususnya Kerjasama internasional telah menurunkan angka perdagangan manusia di Thailand dari tahun 2015 (982 kasus) menjadi 622 kasus pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan penurunan kasus perdagangan manusia di Thailand di mana pada tahun 2014, kasus perdagangan manusia mencapai 595 orang sehingga dari tahun 2014 ke 2015 terjadi kenaikan kasus yang setelah banyak upaya pemerintah Thailand menyebabkan kasus perdagangan manusia menurun tahun 2017.

Meski demikian, Pemerintah Thailand masih menjadikan isu perdagangan manusia menjadi prioritas nasional. Seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas bahwa Pemerintah Thailand tidak hanya ingin semata-mata menyelesaikan isu perdagangan manusia di negaranya saja namun juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Dalam proses memberantas perdagangan manusia, terdapat beberapa tantangan yang menyebabkan kasus perdagangan manusia di Thailand sejatinya sulit diberantas. Pertama terkait dengan kesempatan ekonomi yang kurang. Masalah lapangan pekerjaan yang belum memadai, belum maksimalnya peningkatan kualitas SDM dalam lapangan pekerjaan menyebabkan besarnya angka pengangguran dan memunculkan migrasi besar-besaran yang dapat membuka peluang kejahatan perdagangan manusia. Alasan ekonomi menjadi pendorong pergerakan arus migrasi yang masif dari negara-negara sekitar ke Thailand. Persoalan ekonomi menjadi salah satu motif utama bagi para korban *human trafficking* (Agustina, 2016).

Faktor lainnya berkaitan dengan respon masyarakat mengenai kebijakan pemerintah Thailand dalam menangani *human trafficking* di Thailand yang juga berkaitan dengan dimensi demografi negara ini yang multikultural. Dari kesemuanya berbagai kebijakan pemerintah, diantaranya pendidikan dan akses terhadap kesehatan, pengawasan, dan lain-lainnya ternyata tidak semuanya dapat dioperasionalkan di

seluruh wilayah Thailand. Kebijakan pemerintah tersebut bersifat top to bottom dan tidak melalui pendelegasian kepada pemerintah wilayah (Agustina, 2016) sehingga berbagai program sebagai bentuk implementasi *Multi Track Diplomacy* ini tidak sepenuhnya berjalan secara efektif karena tidak semua masyarakat Thailand memperoleh kebijakan-kebijakan tersebut.

Dengan demikian sepanjang misi Pemerintah Thailand dalam menerapkan pemberantasan perdagangan manusia di Thailand ternyata belum dapat menyelesaikan persoalan secara mendasar. Masalah ini terus begulir bersamaan dengan berkembangnya prostitusi dan sex tourism di negara ini. Persoalan tentang human trafficking di Thailand bukan semata-mata masalah sosial, namun juga ekonomi yang di dalamnya berkaitan dengan tindak kejahatan luar biasa yang relatif sulit untuk ditangani hanya oleh rezim organisasi internasional. Hal inilah yang menyebabkan implementasi kerjasama luar negeri juga belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena persoalan perdagangan manusia di Thailand berkaitan dengan kepentingan dasar masyarakat, yaitu ekonomi sehingga masalah ini menjadi tantangan terberat dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, peneliti simpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan lintas negara yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak. Kerja sama dengan berbagai pihak yang telah dilakukan Pemerintah Thailand menjadi bukti nyata keseriusannya untuk menyelesaikan isu ini. Hasil yang diperoleh dari upaya-upaya tersebut yaitu meningkatkan posisi Thailand ke Tier 2 dalam bidang pemberantasan permasalahan perdagangan manusia.

Meningkatnya posisi Thailand ke Tier 2 tersebut tak lepas dari implementasi MTD yang digalakkan oleh Pemerintah Thailand, walaupun hanya beberapa. MTD menjelaskan mengenai banyaknya jalan yang dapat diambil oleh suatu negara untuk mewujudkan perdamaian bagi negaranya tersebut. Dalam konsep MTD terdapat sembilan track yang dapat dijalankan oleh suatu negara. Secara khusus, Thailand sendiri menjalankan 6 track dari 9 track yang tersedia.

Keenam track tersebut antara lain: Track 1 yang mencakup 16 bentuk kerjasama, Track 2 yang mencakup 12 bentuk kerjasama, Track 3 yang mencakup 3 kerjasama, Track 5 yang mencakup 1 bentuk kerjasama, Track 8 yang mencakup 6 bentuk kerjasama, dan Track 9 yang mencakup 9 kerjasama. Keseluruhan track yang mencakup berbagai kerjasama oleh Pemerintah Thailand tersebut merupakan sebuah upaya yang cukup berhasil.

Keberhasilan ini tentu dikarenakan oleh saling terkaitnya antar kerjasama yang ada, walaupun berbeda track. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai kerjasama yang memang mencakup berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintah, ekonomi dan bisnis, hingga media. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melihat keberhasilan ini Thailand tak berniat berhenti dan masih menjadikan isu perdagangan manusia sebagai prioritas nasional. Jika melihat rekam jejak pemberantasan perdagangan manusia yang dijabarkan dalam penelitian ini, Thailand akan dapat lebih menekan angka kasus perdagangan manusia di tahun-tahun setelahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2016). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 507–517. <https://journal.unair.ac.id/JAHI@ketidakefektifan-program-pemerintah-thailand-dalam-menjalankan-rekomendasi-uniap-article-11059-media-131-category-8.html>
- Asmardika, R. (2017, July 19). *Pengadilan Thailand Vonis Bersalah 21 Pelaku Perdagangan Manusia*. Okezone. <https://news.okezone.com/read/2017/07/19/18/1740079/pengadilan-thailand-vonis-bersalah-21-pelaku-perdagangan-manusia>
- Chairunnisa, T. A. (2021). *Implementasi Kebijakan 5P Strategy Framework Thailand dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Lintas Negara di Sektor Perdagangan Manusia* [Universitas Satya Negara Indonesia]. <http://repo.usni.ac.id/502/>
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi track Diplomacy: A System Approach to Peace*. Kumarian Press.
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Insignia*, 2(1), 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.ins.2015.2.01.434>
- Holsti, K. J. (1992). *International Politics a Framework for Analysis*. A Simon & Schuster Company.
- Hossain, S. (n.d.). *Application of Multi track Diplomacy for Peace Building; a Case Study of Reconciliation Process of Post Kargil War*. [https://www.academia.edu/6616728/Application\\_of\\_Multi\\_Track\\_Diplomacy\\_for\\_Peace\\_Building\\_a\\_Case\\_Study\\_of\\_Reconciliation\\_Process\\_of\\_Post\\_Kargil\\_War](https://www.academia.edu/6616728/Application_of_Multi_Track_Diplomacy_for_Peace_Building_a_Case_Study_of_Reconciliation_Process_of_Post_Kargil_War)
- Institute for Multi-Track Diplomacy. (n.d.). *What is Multi-Track Diplomacy?* <https://imtdsite.wordpress.com/about/what-is-multi-track-diplomacy/#:~:text=Multi-Track Diplomacy is a,82 subscribers>
- Kraft, H. J. S. (2002). Track three diplomacy and human rights in Southeast Asia: the Asia Pacific Coalition for East Timor. *Global Networks*, 2(1), 49–64. <https://doi.org/10.1111/1471-0374.00026>
- McDonald, J. W. (2012). The Institute for Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology*, 3(2), 66–70. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5589748.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand. (2015). *Thailand's Trafficking in Person Report 2015*. [https://www.e-aht.com/startup/downloadInformationDocumentFile?information\\_id=74](https://www.e-aht.com/startup/downloadInformationDocumentFile?information_id=74)
- Ministry of Social Development and Human Security of Thailand. (2017). *Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response (1 January-31 December 2017)*. [https://www.jica.go.jp/Resource/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands\\_country\\_report\\_2017.pdf](https://www.jica.go.jp/Resource/project/thailand/016/materials/ku57pq00001yw2db-att/thailands_country_report_2017.pdf)
- Misti, D. (2018). *Analisis Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Upaya Menangani Kasus Trafficking in Persons Pada Tahun 2015-2017* [Universitas Islam Indonesia]. [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13322/08\\_NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf?sequence=13&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13322/08_NASKAH_PUBLIKASI.pdf?sequence=13&isAllowed=y)
- Mujiono, D. I., & Alexandra, F. (2019). *Multi track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*. Mulawaran University Press.
- Natarajan, M. (2015). *Kejahatan dan Pengadilan Internasional* (M. Rizal (ed.); I. Zakkie (trans.)). Penerbit Nusa Media.

- Notter, J., & Diamond, L. (1996). *Building Peace and Transforming Conflict: Multi-Track Diplomacy in Practice* (7; Occasional Paper). <https://imtdsite.files.wordpress.com/2017/03/op-7.pdf>
- Nursastri, S. A. (2020, May 10). *Perdagangan Manusia di Sektor Perikanan, dari Perbudakan ABK sampai Eksploitasi Seksual*. Kompas. <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/10/100200823/perdagangan-manusia-di-sektor-perikanan-dari-perbudakan-abk-sampai?page=all>
- Nurul, I., Sagita, O., Permatasari, W., Tivanny, C., & Antoni, H. (2023). Upaya Thailand dalam Mengatasi Prostitusi sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) melalui Kerjasama Internasional. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(1), 88–97. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3536>
- Olar, K., & Hume, T. (2015, May 6). *Four arrested after discovery of Thai 'detention camp' with 26 graves*. CNN. <https://edition.cnn.com/2015/05/05/asia/thailand-mass-graves/index.html>
- Oryza, M. D. (2016). Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 410–421. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi968f348014full.pdf>
- Pink, R. M. (2013). Child Trafficking in Thailand: Prevention and Prosecution Challenges. *Asian Affairs: An American Review*, 40(4), 163–174. <https://doi.org/10.1080/00927678.2013.847746>
- Prayuda, R., & Sundari, R. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(1), 80–93. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2\(01\).4429](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jdis.2019.vol2(01).4429)
- Promyamyai, T., & Mairs, S. (2017, July 20). *Thai general among officials jailed for human trafficking*. The Jakarta Post. <http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/20/thai-general-among-officials-jailed-for-human-trafficking.html>
- Purnama, C., Dermawan, W., & Mahyudin, E. (2019). Sosialisasi mengenai Perdagangan Manusia (Human Trafficking) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 90–103. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v1i2.19794>
- Rahmah, A. (2015). *Kebijakan Pemerintah Thailand dalam Mengatasi Human Trafficking dan Implikasinya Terhadap Keamanan di Kawasan Asia Tenggara* [Universitas Pasundan]. <http://repository.unpas.ac.id/11663/>
- Reyes, C. (2015, October 8). *History of Prostitution and Sex Trafficking in Thailand*. End Slavery Now. <https://www.endslaverynow.org/blog/articles/history-of-prostitution-and-sex-trafficking-in-thailand>
- Roby, J. L., & Tanner, J. (2009). Supply and Demand: Prostitution and Sexual Trafficking in Northern Thailand. *Geography Compass*, 3(1), 89–107. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2008.00181.x>
- Rochma, E. J. N. (2021). *Efektivitas rezim United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime dalam Menangani Perdagangan Manusia di Thailand tahun 2014-2018* [UIN Sunan Ampel Surabaya]. [http://digilib.uinsa.ac.id/49373/3/Erlina Jayanti Nur Rochma\\_172217037.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/49373/3/Erlina%20Jayanti%20Nur%20Rochma_172217037.pdf)
- Roujanavong, W. (2013). *Human Trafficking: A Challenge to Thailand and The World Community* (150th International Senior Seminar Visiting Experts' Papers). [https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS\\_No87/No87\\_11VE\\_Wanchai.pdf](https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No87/No87_11VE_Wanchai.pdf)

- Roy, S. L. (1995). *Diplomasi*. Raja Grafindo Persada.
- Royal Thai Embassy. (2017). *Thailand's Country Report on Anti-Human Trafficking Response 2016 (1 January – 31 December 2016)*. <https://www.thaianti-humantraffickingaction.org/Home/wp-content/uploads/2014/12/FINAL-Thailands-Country-Report-on-Anti-Human-Trafficking-Response-2016.pdf>
- Saputra, M. R. (2019). Pelaksanaan Multitrack Diplomacy Dalam Kerjasama Kanada-ASEAN (1977-2018). *EJournal Ilmu Hubungan Internasional Unmul*, 7(1), 261–282. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/EJOURNAL-Rendra-Fix-11-22-18-08-38-17\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/EJOURNAL-Rendra-Fix-11-22-18-08-38-17).pdf)
- Sihotang, N., & Wiriya, C. (2021). Human Trafficking in Thailand in Perspective of Human Rights Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(4), 505–514. <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48760>
- Strategic Information Response Network. (2010). *Mekong Region Country Datasheet: Human Trafficking*. [https://www.no-trafficking.org/reports\\_docs/siren/uniap\\_2010ht\\_datasheets.pdf](https://www.no-trafficking.org/reports_docs/siren/uniap_2010ht_datasheets.pdf)
- UN-ACT. (2018). *UN-ACT Annual Progress Report 2017*. <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/un-act-annual-progress-report-2017>
- United States Department of State. (2017). *2017 Trafficking in Persons Report-Thailand*. <https://www.refworld.org/docid/5959ec41a.html>
- Wehrenfennig, D. (2008). Multi-Track Diplomacy and Human Security. *Journal of Human Security*, 7(7), 80–89. [https://www.researchgate.net/publication/296668093\\_Multi-Track\\_Diplomacy\\_and\\_Human\\_Security](https://www.researchgate.net/publication/296668093_Multi-Track_Diplomacy_and_Human_Security)
- Widhi, M. N. C. (2018). Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand. *Journal of International Relations*, 4(4), 730–738.
- Winterdyk, J. (2020). Explaining Human Trafficking: Modern Day-Slavery. In J. Winterdyk & J. Jones (Eds.), *The Palgrave International Handbook of Human Trafficking* (pp. 1257–1274). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8\\_68](https://doi.org/10.1007/978-3-319-63058-8_68)

**LAMPIRAN**

<b>Track</b>	<b>Kerjasama</b>
1	Myanmar: mereview dan memperbaharui MoU yang ditandatangani Myanmar dan Thailand pada 2009 silam untuk meningkatkan
	Laos: Pada tahun 2016, Thailand dan Laos sedang dalam proses memperbarui MOU tentang kerjasama untuk memerangi perdagangan orang, yang awalnya ditandatangani pada tahun 2006, yang mengarah pada langkah-langkah yang lebih kuat dalam mencegah dan menekan perdagangan orang.
	Kamboja: Kamboja bekerja sama dengan Thailand dalam mengembangkan rencana aksi bersama untuk melengkapi MOU kerja sama memerangi perdagangan orang, yang ditandatangani pada 30 Oktober 2014.
	Vietnam: Thailand dan Vietnam telah bekerja sama dalam mempersiapkan pekerja Vietnam untuk bermigrasi ke Thailand, berdasarkan MOU yang ditandatangani tahun 2015 tentang kerja sama perburuhan, termasuk pelatihan dan pembuatan manual dalam bahasa Vietnam.
	Jepang: Kerja sama selama beberapa tahun terakhir termasuk kerangka konsuler, seminar meja bundar tentang kerja sama hukum dalam memerangi perdagangan orang, dan Nota Kerjasama Pertukaran Informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia.
	Uni Emirat Arab: menandatangani Memorandum of Understanding on Cooperation in Combating Trafficking in Persons pada awal 2017
	CLMVT; MoU Kerjasama mengenai Ketenagakerjaan dan buruh dengan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam
	COMMIT; Mengimplementasikan MoU dengan membuat Sub-regional Plans of Action
	ASEAN Framework; merancang rencana aksi melawan perdagangan manusia dengan fokus wanita dan anak
	AAPTIP; pertemuan untuk investigasi dan bertukar informasi mengenai perdagangan manusia
	<i>The Bali Process</i> ; pertemuan yang berfokus pada pembahasan migrasi yang tidak teratur baik lingkup global maupun asia-pasifik
<i>International Fora</i> : Perdana Menteri menjanjikan dukungan untuk pengembangan sistem penyaringan yang efektif untuk mengurangi risiko	

	<p>orang menjadi korban perdagangan manusia dan memberlakukan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penindasan Penyiksaan dan Penghilangan Paksa untuk memperkuat penerapan prinsip non-refoulment</p>
	<p>TICAC; TICAC bekerja sama dalam berbagi intelijen, melatih pemangku kepentingan</p> <p>tentang kejahatan internet terhadap anak</p>
	<p>ACT; menyediakan</p> <p>tempat penampungan serta sumber daya bagi korban eksploitasi dan pelecehan seksual anak, dan menawarkan perawatan komprehensif terhadap korban.</p>
	<p>Pusat Penyelundupan dan Perdagangan Manusia di Washington DC: bertukar informasi dan pengalaman dengan Thailand dalam mengembangkan database kasus perdagangan manusia.</p>
	<p>Penerapan Prinsip Umum dan Panduan Operasional ILO</p>
2	<p><i>Migrant Workers Assistance Center</i>: kolaborasi Kementerian Tenaga Kerja dan NGO, Stella Maris</p>
	<p><i>Open Heart to Combat Trafficking-in-Persons Meeting</i>; undangan pertemuan badan pemerintah terkait serta LSM lokal maupun internasional untuk bertukar informasi serta pikiran mengenai kasus perdagangan manusia yang benar-benar terjadi</p>
	<p><i>Seafood Task Force</i>; pembentukan aliansi multi-stakeholder yang beranggotakan perusahaan retail Eropa dan AS, supplier, dan prosesor produk udang serta LSM lainnya</p>
	<p>Kerjasama dengan NGO dan OI lainnya;</p>
	<p>Pertemuan CMM;</p>
	<p>Kerjasama Kementerian Pembangunan Sosial &amp; Keamanan Manusia dengan JICA;</p>
	<p>CLMVT; MoU Kerjasama mengenai Ketenagakerjaan dan buruh dengan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam</p>
	<p><i>The Bali Process</i>; Pertemuan berfokus pada tantangan yang ditimbulkan oleh migrasi yang tidak teratur, baik secara global maupun di kawasan Asia-Pasifik, dan juga berkontribusi pada Konferensi Menteri ke-6 <i>Bali Process</i></p>

	EU; Pemerintah Thailand dan EU bertemu untuk membahas serta bertukar informasi mengenai reintegrasi korban perdagangan manusia serta membuat proyek Migration EU eXpertise (MIEUX)
	ILO; Proyek “Memerangi Bentuk Pekerjaan yang Tidak Dapat Diterima di Industri Perikanan dan Makanan Laut Thailand”
	UN-ACT;
	Winrock International
3	National Fisheries Institute; Red Lobster; Walmart: Bekerja sama dengan Kemenlu Thailand untuk bertukar pikiran secara reguler
5	UN-ACT: Pertemuan dan Pelatihan Lembaga Penegak Hukum
8	Kerjasama dengan NGO dan OI; US Department of State; Kedutaan US di Bangkok; USAID; UN-ACT
9	FCCT; AP; The New York Times; Aljazeera; NIKKEI; Reuters; Berna News; 7Day News; ILO (PR): Kemenlu serta Kedutaan Thailand bekerjasama dengan media lokal maupun internasional untuk menyorot masalah perdagangan manusia, mendukung riset lanjutan, monitoring sumber daya, dan mengembangkan sebuah database atau platform komunikasi efektif